

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 2 Tahun 2024, p 226-235

Article

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan untuk Mengurangi Kemiskinan di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Muhamad Lutvi^{1*}, Rohim²

¹² Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember, Indonesia

* Correspondence Author: lutvimuhammad319@gmail.com

Abstract: *The number of beneficiary families is a reflection of the high poverty rate in Indonesia. The purpose of this study is to determine the role of the Jember Regency Social Service in reducing the number of beneficiary families. This research uses qualitative research methods, by interviewing several trusted sources. The technique of determining informants using purposive sampling technique. The types of data are primary data and secondary data. Data analysis using observation, interviews and documentation. The results of this study, First; overseeing / accompanying the process of determining and receiving PKH social assistance. Second; monitoring and evaluating community empowerment activities carried out by the Social Service through village assistants. Third; mediator between the community with KPM and PKH. Fourth; facilitator by creating conditions conducive to the implementation of PKH assistance. In conclusion, the Jember Regency Social Service carries out its role very well in the community.*

Keywords: *Role, Empowerment, Family Hope Program (PKH)*

Abstrak: Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan cerminan dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengurangi jumlah keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mewawancarai beberapa narasumber yang terpercaya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, Pertama; mengawal/mendampingi proses penetapan dan penerimaan bantuan sosial PKH. Kedua; memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping desa. Ketiga; mediator antara masyarakat dengan KPM dan PKH. Keempat; fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan bantuan PKH. Kesimpulannya Dinas Sosial Kabupaten Jember menjalankan perannya dengan sangat baik di masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Program Keluarga Harapan (PKH).

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multisektoral dan menjadi tugas semua pihak untuk menanggulanginya, baik di tingkat kementerian atau lembaga maupun di tingkat masyarakat. Kemiskinan telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik di tingkat daerah, maupun di kementerian atau lembaga tertentu. Seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam kemiskinan adalah mereka yang hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat tidak dapat dipenuhi secara penuh. (Haftu, 2019) Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik dari segi makanan maupun non-makanan mendefinisikan kemiskinan. (BPS, 2020)

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan disebut sebagai kemiskinan. Salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh kekuatan ekonomi adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Pemerintah telah membuat program-program penanggulangan kemiskinan untuk menanggulangi masalah ini dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan upaya masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Peraturan Presiden (Perpres), 2015a)(Peraturan Presiden (Perpres), 2015b)

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi kemiskinan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Bahkan, undang-undang seperti UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, antara lain, telah mendukung upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan (van Wesenbeeck, 2021). Namun, karena fenomena kemiskinan masih terlihat, implementasinya memerlukan pengujian dan penilaian yang komprehensif pengujian dan penilaian yang komprehensif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu membuat program-program pemberdayaan yang mampu mensejahterakan masyarakat atau keluarga miskin. Pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat (Gramedia Blog, n.d.). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin, sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Adegbeye, 2020).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) (KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa: "Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial"(PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2009).

Upaya pemerintah untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial dikenal sebagai PKH. PKH merupakan program yang menangani masalah kesejahteraan sosial. Salah satu instansi pemerintah yang terlibat dalam masalah sosial adalah Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang bekerja di bidang sosial. PKH lebih menitikberatkan pada penciptaan sistem jaminan bagi masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor; 42/HUK/2007 yang menjadi dasar

pelaksanaan PKH (KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2021). PKH merupakan program perlindungan sosial yang menawarkan bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial. Dengan syarat-syarat tertentu, seperti persyaratan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin.

Dalam pelaksanaan PKH, Dinas Sosial memiliki peran sebagai aktor yang sangat penting dalam menyukseskan PKH. Dinas Sosial merupakan unit pemerintah di bidang sosial yang mengelola suatu kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan serta menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih baik (Wang, 2022). Dinas Sosial juga memiliki peran untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Dinas Sosial sebagai lembaga sosial memiliki tugas sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada masyarakat.

Kabupaten Jember adalah sebuah kota yang terletak di tengah-tengah wilayah tapal kuda, provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan (Pemerintah Kabupaten Jember, n.d.) dan (radarjember.id, 2024). Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Jember pada Maret 2022 mencapai 232,73 ribu orang. Jumlah ini berkurang 24,36 ribu orang, dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 257,09 ribu orang (BPS Kabupaten Jember, 2022).

Pada penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian. Penelitian sebelumnya yang fokus untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Sirimau serta kendala apa saja dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Melalui PKH di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Penelitian ini hanya berfokus secara khusus terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKH di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tujuan utamanya adalah untuk memperkaya kajian keilmuan di bidang kesejahteraan masyarakat dan menjadi praktik terbaik dalam pengelolaan program sejenis (Angkotasan, 2022)

Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan utama mengatasi kemiskinan di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember (Gulati, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memahami peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan fokus pada Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH di wilayah tersebut. (Kouadio, 2022) Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi secara jelas bagaimana Dinas Sosial berperan dalam mendampingi, memfasilitasi, dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut etimologinya, peran adalah individu yang melakukan tindakan yang diharapkan oleh orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki arti penting bagi sebagian orang. peran dicirikan sebagai pola perilaku yang dituntut dari seseorang yang memiliki posisi tertentu oleh masyarakat. dalam konteks ini, koneksi terkait dengan peran yang dipegang seseorang yang sesuai dengan peringkat sosial tertentu (Raho, 2007).

Pemberdayaan adalah sebuah metode dan juga tujuan. Di sisi lain, proses pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan dan keberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti mereka yang

bergelut dengan kemiskinan. Pemberdayaan, di sisi lain, merupakan tujuan yang menggambarkan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dari sebuah transformasi sosial, yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan berdaya (Edi Suharto, 2006)

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku keluarga miskin. Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: "Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menagam risiko dari guncangan dan kerentanan sosial". Program ini sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan (Prasetyo, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam hal ini untuk menilai dan mengkarakterisasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Diharapkan dengan menggunakan strategi ini akan memudahkan penulis dalam menelaah bahan yang telah dikumpulkan secara lisan, tertulis, atau melalui pengamatan dari sejumlah informan yang telah dipilih dengan baik. Pada penelitian kualitatif penentuan informan dilakukan dengan teknik purposiv sampling yang dimana data diperoleh dari pemilik informasi.

JENIS DATA

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang dimana pengumpulan datanya diperoleh dari data sekunder dan data primer.

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari hasil pengamatan langsung terhadap informan mengenai subjek penelitian yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan penelitian (Mukhtar, 2013). Pada penelitian ini didapatkan data yang diamati dengan akurat di Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Kecamatan Tempurejo dan Desa Sanenrejo yang diambil dengan cara wawancara yaitu kepada Perlindungan Jaminan Sosial (LIJAMSOS) Dinas Sosial Kabupaten Jember, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator PKH Kecamatan Tempurejo.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari tangan kedua atau ketiga dan digunakan untuk melengkapi data asli secara tidak langsung (Mukhtar, 2013). Data didapatkan langsung dari informan, serta keterangan lain yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Sanenrejo. (Ullah, 2021) Data sekunder yang diambil menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengambilan gambar dan dokumen-dokumen yang diperlukan didalam penelitian.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pemilihan informan adalah faktor utama yang dipertimbangkan saat mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Informan didefinisikan sebagai orang yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti dan dianggap menguasai topik yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dapat memberikan wawasan tentang sumber-sumber bukti yang mendukung penelitian serta memberikan informasi tentang keadaan dan konteks penelitian (J.Moleong, 2014).

Karena penelitian ini mengenai peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan untuk mengurangi kemiskinan maka diperlukan informasi yang betul-betul paham mengenai program keluarga harapan yang dilakukan. Penentuan informan ini dipilih beberapa orang yang benar- benar mengetahui tentang informasi yang ada mengenai fakta peran dinas sosial yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Daftar Pengumpulan Data

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Taufik	Kepala Perlindungan Jaminan Sosial	1
2	Fauzi	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1
3	Zaenal	Koordinator PKH Kecamatan Tempurejo	1
Total			3

ANALISIS DATA

Tujuan dari metode pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi dengan cara yang mendukung penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif baik secara lisan maupun tertulis. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi (J. Moleong, 2014).

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung pada peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo. Metode observasi partisipatif (terlibat langsung dalam kegiatan) dan non-partisipatif (tidak terlibat langsung dalam kegiatan) dapat digunakan. Metode observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipatif, artinya peneliti tidak ikut melakukan kegiatan sehari-hari maupun tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sumber data.

Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan parameter wawancara yang telah ditentukan. Metode wawancara yang sebanding dengan metode lainnya adalah wawancara mendalam. Perbedaannya dengan wawancara konvensional antara lain terletak pada tujuan wawancara, peran informan, fungsi pewawancara, dan cara wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu Perlindungan Jaminan Sosial (LIJAMSOS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Koordinator PKH Kecamatan Tempurejo.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu menganalisis peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Desa Sanenrejo serta dokumen yang disajikan dalam bentuk gambar untuk data sekunder yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan dari sumber data yang jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember, terdapat fenomena kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 mencapai 582.000 keluarga. Masuknya data kemiskinan tersebut melalui pendataan secara rinci dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Namun, data yang ada di dalam surat keputusan bupati Jember hanya memuat 33.433 keluarga. Hal ini disebabkan oleh hasil verval yang dilakukan oleh Bupati Jember dan para camat di Kabupaten Jember (Haldar, 2023). Menurut Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan upaya masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya meningkatkan efisiensi penanggulangan kemiskinan di bidang jaminan sosial. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

PKH juga dilaksanakan di salah satu desa di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember yaitu Desa Sanenrejo pada tahun 2014 (Hiaroh, n.d.). Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh warga di Desa Sanenrejo adalah bekerja sebagai petani yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dengan penghasilan seadanya. Dalam hal ini, terdapat warga miskin yang tidak memperhatikan kesehatan anak, tidak mampu menyekolahkan anak, bahkan tidak

memperhatikan kesehatan ibu hamil. Oleh karena itu, penanganan penanggulangan kemiskinan di Desa Sanenrejo membutuhkan program-program yang tepat sasaran.

Tabel 2. Data Penerima KPM PKH di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

Tahun	Jumlah KPM PKH
2022	499 KPM
2023	459 KPM

Sumber : Koordinator PKH Kecamatan Tempurejo

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa, Dinas Sosial sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember khususnya di Desa Sanenrejo yang mengalami penurunan jumlah penerima KPM sebanyak 40 KPM PKH. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, peran Dinas Sosial Kabupaten Jember akan mendampingi KPM PKH dalam segala permasalahan yang berkaitan dengan perolehan bantuan. Dinas Sosial memiliki tugas untuk memberikan dukungan dan pelayanan publik. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH adalah:

1. Mengawal/Mendampingi Proses Penetapan dan Penerimaan Bantuan Sosial PKH

Lokasi dan jumlah penerima manfaat PKH akan dikonfirmasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Selain itu, Dinas Sosial akan mengadakan pertemuan awal dengan calon penerima manfaat PKH. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membiasakan calon penerima manfaat PKH dengan bantuan yang akan mereka terima, membantu mereka memahaminya, dan memastikan bahwa mereka siap untuk menjadi penerima manfaat. Dinas Sosial akan memverifikasi informasi calon penerima manfaat PKH pada pertemuan pertama (Neves, 2022). Dinas Sosial akan melakukan sosialisasi kepada calon KPM dengan topik-topik terkait PKH setelah Pertemuan Awal dengan calon KPM. Dinas Sosial Kabupaten Jember melakukan sosialisasi yang meliputi penjelasan mengenai tujuan dan prasyarat serta kewajiban menjadi penerima manfaat PKH, informasi yang diperlukan untuk membuka rekening KPM, konsekuensi dan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH, proses dan mekanisme penanganan pengaduan, hak dan tanggung jawab KPM PKH, dan jadwal penyaluran PKH.

Untuk memastikan bahwa bantuan sosial PKH tidak salah sasaran, Dinas Sosial akan mengunjungi rumah-rumah peserta yang telah memenuhi syarat untuk menjadi KPM sebagai bagian dari proses validasi data. Selain pengamatan dan pengawasan, Dinas Sosial akan turun ke lapangan untuk melihat dan mengawasi semua prosedur pembayaran bantuan setelah pengguna bansos PKH teridentifikasi. Untuk memastikan keamanan dan pengendalian proses pembayaran, Dinas Sosial akan melakukan persiapan yang diperlukan sebelum kegiatan dan proses pembayaran. Untuk meminta jadwal, melacak penerima bantuan sosial PKH, dan memastikan bahwa orang yang tepat mendapatkan pembayaran manfaat mereka tepat waktu, Dinas Sosial akan berkolaborasi dengan Bank. Pembayaran manfaat sering kali dilakukan secara bertahap, terutama kepada kelompok penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya oleh tim lapangan Dinas Sosial.

2. Monitoring and Evaluation

Dinas sosial melakukan pemantauan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mengajukan permohonan Graduasi Mandiri kepesertaan program bantuan sosial. Graduasi Mandiri merupakan tahapan dimana KPM PKH telah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari program sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan protap yang telah ditetapkan dalam kunjungan kali ini. Selain itu, mereka juga berbincang-bincang dengan KPM untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi dan perkembangan setelah mereka mengajukan graduasi mandiri (Galli, 2019). Selain itu, bantuan usaha

PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) juga diawasi oleh Dinas Sosial. Kementerian Sosial menawarkan bantuan ini sebagai bagian dari program untuk mendukung individu dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Melalui pengawasan ini, Dinas Sosial memastikan bahwa KPM mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari bantuan tersebut dan bantuan tersebut digunakan dengan tepat. Contoh bantuan usaha PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) untuk komunitas graduasi mandiri antara lain:

- a. UMKM, Kementerian Sosial membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan modal.
- b. Perbengkelan, dengan memberikan peralatan dan pelatihan kepada pemilik usaha untuk pengembangan usahanya.

KPM atau penerima PKH akan dimonitoring secara berkala oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember (Tega, 2023). Oleh karena itu, jika hasil temuan monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya kemajuan dalam pencapaian tujuan bantuan sosial PKH, maka pelaksanaan PKH dapat dikatakan berkembang. Tujuan dari monitoring dan evaluasi PKH adalah untuk mengawasi bagaimana program bantuan PKH dilaksanakan. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada pelaksana program Dinas Sosial untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, pemantauan ini akan mendeteksi berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan PKH. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program bantuan sosial PKH.

3. Mediator

Mediator antara masyarakat dan KPM PKH adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial akan membantu KPM dalam menyelesaikan masalah bantuan sosial PKH. Kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) akan dipimpin oleh pendamping sosial. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas, menangani, dan mensosialisasikan pengaduan, keluhan, dan informasi terkait kesehatan dan pendidikan. (Zhang, 2022) Apabila KPM tidak dapat menghadiri kegiatan pertemuan kelompok PKH, maka Dinas Sosial di lapangan akan melakukan kunjungan ke rumah KPM.

4. Fasilitator

Dinas Sosial juga sebagai fasilitator menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan bantuan PKH. Sebagai fasilitator, dinas sosial berupaya menciptakan atau memfasilitasi suasana ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana seperti membantu memasuki data KPM dan memperbarui data KPM melalui aplikasi yang tersedia.

Masyarakat terpengaruh dalam berbagai cara melalui pemberdayaan PKH. Program bantuan sosial pemerintah yang dikenal dengan bansos PKH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah dampak yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat PKH:

1. Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Perekonomian masyarakat penerima bansos PKH tidak diragukan lagi terkena dampak dari penyalurannya. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi indikasi menguatnya ekonomi keluarga. KPM mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan dari pemerintah melalui PKH. Masyarakat yang menerima bansos PKH mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut (Liu, 2021). Dampak utamanya adalah berkurangnya beban keuangan keluarga yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ketika menjadi KPM. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, PKH memberikan akses kepada KPM untuk mendapatkan bantuan berupa layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga KPM dapat memperoleh manfaat dari kedua entry point tersebut.

2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkatkan melalui pemberian bantuan sosial PKH. Dimulai dengan memberikan akses kepada KPM untuk mendapatkan bantuan di bawah Komponen Kesehatan yang mencakup Anak Usia Dini dan Ibu Hamil-pemerintah secara nyata menawarkan kepada KPM sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penggunaan bantuan PKH.

Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang dialami oleh PKH Dinas Sosial Kabupaten Jember yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH ini, antara lain:

1. Faktor Penghambat
 - a. Ketidaksinkronan data KPM menjadi tantangan pelaksanaan PKH yang dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember sehingga hal ini harus menunggu perbaikan dan registrasi ulang ke data DTKS pusat.
 - b. Permasalahan sosial di lingkungan sekitar
Dinas Sosial Kabupaten Jember sering menemukan salah satu masalah yang paling sering terjadi di masyarakat, yaitu tidak meratanya pembagian bantuan PKH. Fakta bahwa tidak semua nama yang diusulkan layak mendapatkan bantuan sosial PKH menyebabkan terjadinya perselisihan di masyarakat. Konflik sosial sering terjadi di masyarakat sebagai akibat dari persepsi bahwa bantuan sosial PKH tidak memadai.
2. Faktor Pendukung
 - a. Aplikasi SIKS-NG
Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) yang berguna untuk menginput data dan melakukan pemutakhiran data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan.
 - b. Sumber Daya Manusia yang Memadai
Terdapat pihak-pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Jember yang melayani terkait KPM PKH, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), Koordinator Kecamatan, Operator DTKS, dll.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH. Melalui pendampingan, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, terlihat adanya peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran Dinas Sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.

Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait implementasi Program Keluarga Harapan di berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian eksperimental yang melibatkan pembandingan antara kelompok yang mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial dengan kelompok kontrol dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang dampak dari peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Eksperimen yang melibatkan evaluasi program secara menyeluruh dan jangka panjang juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan studi yang disajikan dalam file PDF mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diajukan beberapa rekomendasi operasional sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Jember perlu meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat, LSM, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat pelaksanaan program PKH dan memastikan keberlanjutannya.
2. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala harus dilakukan untuk staf Dinas Sosial dan pendamping desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pelibatan masyarakat, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PKH.
3. Dinas Sosial harus membangun sistem komunikasi yang transparan dan efisien dengan keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran mereka dengan segera, menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi dalam kegiatan program.

4. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan harus dilaksanakan untuk menilai efektivitas inisiatif pemberdayaan masyarakat di bawah program PKH, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan perbaikan program.
5. Dinas Sosial harus mengeksplorasi pendekatan inovatif, seperti proyek percontohan atau kemitraan dengan sektor swasta, untuk memperluas dampak program PKH dan menjangkau lebih banyak keluarga rentan di wilayah tersebut.

Dengan menerapkan rekomendasi operasional ini, Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat lebih meningkatkan perannya dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkotasan, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.
- BPS Kabupaten Jember. (2022). Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Jember. <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/30/258/profil-kemiskinan-maret-2022-kabupaten-jember.html>
- BPS. (2020). No Titl. <https://e-journal.uajy.ac.id/25389/3/1611231242.pdf>
- Edi Suharto. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama.
- Gramedia Blog. (n.d.). Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya. <https://www.gramedia.com/literasi/strategi-pemberdayaan-masyarakat/>
- Hiaroh, R. I. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN di DESA TEMPUREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER. [http://repository.unmuhjember.ac.id/4508/1/artikel skripsi.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/4508/1/artikel%20skripsi.pdf)
- J. Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA. (2021). PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>
- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Program Keluarga Harapan (PKH). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi (GP Press Group).
- Pemerintah Kabupaten Jember. (n.d.). Kabupaten Jember. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>
- Peraturan Presiden (Perpres). (2015a). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41841/perpres-no-96-tahun-2015>
- Peraturan Presiden (Perpres). (2015b). Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41841/perpres-no-96-tahun-2015>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>
- radarjember.id. (2024). Letak Kabupaten Jember Dimana? Ini Penjelasan Geografis Jember. <https://radarjember.jawapos.com/jember/794445021/letak-kabupaten-jember-dimana-ini-penjelasan-geografis-jember>
- Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern (16th ed.). Prestasi Pustaka.
- Adegbeye, M. J. (2020). Sustainable agriculture options for production, greenhouse gasses and pollution alleviation, and nutrient recycling in emerging and transitional nations - An overview. *Journal of Cleaner Production*, 242. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118319>
- Galli, F. (2019). Food waste reduction and food poverty alleviation: a system dynamics conceptual model. *Agriculture and Human Values*, 36(2), 289–300. <https://doi.org/10.1007/s10460-019-09919-0>
- Gulati, G. (2020). Domestic violence against women and the COVID-19 pandemic: What is the role

- of psychiatry? *International Journal of Law and Psychiatry*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101594>
- Haftu, G. G. (2019). Information communications technology and economic growth in Sub-Saharan Africa: A panel data approach. *Telecommunications Policy*, 43(1), 88–99. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.03.010>
- Haldar, A. (2023). Towards achieving Sustainable Development Goal 7 in sub-Saharan Africa: Role of governance and renewable energy. *Sustainable Development*, 31(4), 2446–2463. <https://doi.org/10.1002/sd.2521>
- Hiaroh, R. I. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN di DESA TEMPUREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER*.
- J.Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kouadio, H. K. (2022). Do economic growth and institutional quality reduce poverty and inequality in West Africa? *Journal of Policy Modeling*, 44(1), 41–63. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.09.010>
- Liu, F. (2021). Role of education in poverty reduction: macroeconomic and social determinants form developing economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(44), 63163–63177. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15252-z>
- Neves, J. A. (2022). The Brazilian cash transfer program (Bolsa Família): A tool for reducing inequalities and achieving social rights in Brazil. *Global Public Health*, 17(1), 26–42. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1850828>
- Prasetyo, P. E. (2020). Human capital, institutional economics and entrepreneurship as a driver for quality & sustainable economic growth. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2575–2589. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(1\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(1))
- Tega, M. (2023). Farmer's Perceptions of Agroforestry Practices, Contributions to Rural Household Farm Income, and Their Determinants in Sodo Zuria District, Southern Ethiopia. *International Journal of Forestry Research*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/5439171>
- Ullah, A. (2021). Sustainable utilization of financial and institutional resources in reducing income inequality and poverty. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su13031038>
- van Wesenbeeck, C. F. A. (2021). Can China's overuse of fertilizer be reduced without threatening food security and farm incomes? *Agricultural Systems*, 190. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103093>
- Wang, P. (2022). Is Digital Adoption the way forward to Curb Energy Poverty? *Technological Forecasting and Social Change*, 180. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121722>
- Zhang, Y. (2022). Impact of different models of rural land consolidation on rural household poverty vulnerability. *Land Use Policy*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105963>